



YAYASAN PENDIDIKAN & SOSIAL "FATAHILLAH"

SMA FATAHILLAH

(TERAKREDITASI "A")

Alamat : Jl. Raya Buncit No. 67 Kalibata Pancoran Jakarta-Selatan 12740

Telp / Fax. (021).7940492, Email : sma_fatahillah@ymail.com

PENILAIAN AKHIR SEMESTER GANJIL TP. 2021/2022

MATA PELAJARAN

: PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

KELAS/PROGRAM

: X (SEPULUH) IPA/IPS

HARI, TANGGAL

: Selasa, 30 Nopember 2021

WAKTU

: 120 Menit

PETUNJUK UMUM

1. Mulailah dengan membaca *Bismillahirrahmaanirrahiim*
 2. Periksa dan bacalah lebih dahulu soal-soal sebelum anda menjawab
 3. Laporkan kepada pengawas bilamana terdapat tulisan yang kurang jelas atau jumlah lembar soal kurang
 4. Dahulukan menjawab soal-soal yang dianggap mudah
 5. Periksa kembali jawaban anda sebelum menyerahkan ke pengawas
-

Pilihlah satu jawaban yang menurutmu paling tepat pada kotak yang disediakan.

1. Perhatikan macam-macam pembagian kekuasaan negara berikut:

- 1) Kekuasaan legislatif
- 2) Kekuasaan eksekutif
- 3) Kekuasaan yudikatif
- 4) Kekuasaan eksaminatif
- 5) Kekuasaan moneter

Montesquieu membagi kekuasaan menjadi tiga macam, ditunjukkan pada nomor

- A. 1, 2, dan 3
- B. 1, 2, dan 5
- C. 1, 3, dan 5
- D. 2, 4, dan 5
- E. 3, 4, dan 5

2. Kekuasaan untuk menyelenggarakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara di Indonesia dilakukan oleh kekuasaan

- A. Legislatif
- B. Yudikatif
- C. Federatif
- D. Moneter
- E. Eksaminatif

3. Kekuasaan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemeriksaan atau pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara di Indonesia dilakukan oleh

- A. Bank Indonesia
- B. Badan Pemeriksa Keuangan
- C. Mahkamah Agung
- D. Mahkamah Konstitusi
- E. Komisi Yudisial

4. Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat termuat dalam UUD 1945 pasal
- A. 18 ayat (1)
 - B. 18 ayat (2)
 - C. 18 ayat (3)
 - D. 18 ayat (4)
 - E. 18 ayat (5)
5. Pernyataan berikut yang merupakan salah satu kelebihan sistem pembagian kekuasaan di Indonesia adalah
- A. Memungkinkan adanya kompetisi antarlembaga
 - B. Melahirkan kekuasaan yang bersifat absolut
 - C. Memungkinkan adanya kerja sama dan saling mengawasi
 - D. Tidak adanya privasi tiap lembaga negara
 - E. Memunculkan motivasi untuk lebih baik dari lembaga lain
6. Konsekuensi tidak dipisahannya kekuasaan di Indonesia adalah
- A. Dapat mengakibatkan ketidakstabilan pemerintahan
 - B. Terjadi ketidakseimbangan kekuasaan
 - C. Dapat terjadi koordinasi antarbagian
 - D. Dapat terjadi pencampuran kekuasaan
 - E. Kemungkinan terjadi kekacauan politik
7. Perhatikan keberadaan kementerian negara Republik Indonesia dalam UUD 1945:
- 1) Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara
 - 2) Menteri-menteri diangkat dan diberhentikan oleh presiden
 - 3) Menteri dipilih melalui pemilihan umum
 - 4) Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan
 - 5) Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang
- Dalam UUD 1945 pasal 17 dinyatakan bahwa keberadaan kementerian negara Republik Indonesia ditujukkan pada nomor
- A. 1, 2, dan 3
 - B. 1, 2, dan 4
 - C. 1, 3, dan 5
 - D. 2, 4, dan 5
 - E. 3, 4, dan 5
8. Keberadaan kementerian negara diatur dalam Peraturan Presiden RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang
- A. Kementerian Negara
 - B. Organisasi Kementerian Negara
 - C. Organisasi Negara
 - D. Kementerian Negara Republik Indonesia
 - E. Pemerintahan Daerah
9. Yang bertugas melakukan sinkronisasi dan koordinasi urusan kementerian yang berada dalam ruang lingkupnya, kecuali

- A. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, Dan Keamanan
- B. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
- C. Kementerian Koordinator Hukum Dan Hak Asasi Manusia
- D. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan
- E. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Dan Investasi

10. Perhatikan nama kementerian-kementerian berikut:

- 1) Kementerian Dalam Negeri
- 2) Kementerian Luar Negeri
- 3) Kementerian Agama
- 4) Kementerian Keuangan
- 5) Kementerian Pertahanan

Yang menangani urusan pemerintahan yang nomenklaturnya secara tegas disebutkan dalam UUD 1945 adalah

- A. 1, 2, dan 3
- B. 1, 2 dan 4
- C. 1, 2 dan 5
- D. 2, 3, dan 4
- E. 3, 4, dan 5

11. Kementerian yang menangani urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah adalah

- A. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
- B. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
- C. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
- D. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
- E. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

12. Berikut yang merupakan lembaga pemerintah nonkementerian yang berada di bawah koordinasi Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah

- A. Arsip Nasional Republik Indonesia
- B. Badan Pengawasan Obat dan Makanan
- C. Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional
- D. Badan Koordinasi Penanaman Modal
- E. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional

13. Nilai-nilai Pancasila yang dapat berubah sesuai perkembangan masyarakat disebut nilai

- A. Etis
- B. Instrumental
- C. Praksis
- D. Dasar
- E. Estetis

14. Nilai-nilai Pancasila merupakan cita-cita tentang kebaikan yang harus diwujudkan menjadi suatu kenyataan pernyataan tersebut merupakan

- A. Das sollen
B. Das sein
C. Das sollen dan das sein
D. Causa materialis
E. Pandangan hidup
15. Nilai Pancasila berubah sesuai perkembangan zaman dengan tujuan
A. Menyamakan dengan negara-negara maju
B. Menyesuaikan dengan keinginan pimpinan tiap lembaga
C. Menyesuaikan dengan dasar negara-negara maju
D. Menyamakan dengan ideologi negara lain
E. Menyesuaikan dengan kondisi masyarakat yang terus berubah
16. Pancasila mengandung nilai-nilai keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagai landasan keseluruhan nilai dalam falsafah negara. Hal ini sesuai dengan tata nilai utama Pancasila yaitu dimensi
A. Kultural
B. Spiritual
C. Material
D. Institusional
E. Instrumental
17. Perilaku yang seuai dengan nilai sila kedua Pancasila adalah
A. Gotong royong dengan masyarakat sekitar rumah
B. Toleransi dalam masyarakat yang berbeda agama
C. Kerja sama untuk kebersihan lingkungan sekolah
D. Rajin beribadah sesuai perintah agama yang dianutnya
E. Mengakui bahwa persamaan harkat dan martabat sada pada setiap manusia
18. Deklarasi Juanda yang menetapkan lebar laut wilayah Indonesia 12 mil diukur dari pantai diumumkan pemerintah Indonesia pada
A. 12 Desember 1957
B. 13 Desember 1957
C. 14 Desember 1959
D. 15 Desember 1959
E. 16 Desember 1959
19. Zona landas kontinen untuk kepentingan penguasaan dan yurisdiksi kekayaan dalam dasar laut dengan negara tetangga adalah kedalaman
A. 70 m
B. 80 m
C. 90 m
D. 100 m
E. 200 m

20. Negara mempunyai hak untuk menggali kekayaan alam dan melakukan kegiatan ekonomi, serta menangkap nelayan asing yang mencuri ikan dalam zona ekonomi ekslusifnya yang batasnya
- A. 100 mil
 - B. 200 mil
 - C. 300 mil
 - D. 400 mil
 - E. 500 mil
21. Kekuasaan untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta memelihara kestabilan rupiah disebut dengan kekuasaan
- A. Legislatif
 - B. Yudikatif
 - C. Eksaminatif
 - D. Moneter
 - E. Konstitutif
22. Pernyataan berikut yang paling tepat adalah
- A. Kekuasaan legislatif merupakan kekuasaan untuk membentuk undang-undang
 - B. DPR menjalankan kekuasaan konstitutif
 - C. Kekuasaan eksaminatif dijalankan oleh Bank Indonesia
 - D. Kekuasaan moneter dijalankan oleh Badan Pemeriksa Keuangan
 - E. Presiden berkedudukan sebagai kepala negara
23. Bank Indonesia merupakan bank sentral di Indonesia yang melaksanakan kekuasaan
- A. Keuangan
 - B. Moneter
 - C. Eksaminatif
 - D. Inspektif
 - E. Konstitutif
24. Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. Pernyataan tersebut merupakan bunyi UUD 1945 pasal
- A. 18 ayat (1)
 - B. 18 ayat (4)
 - C. 18 ayat (5)
 - D. 18 A ayat (1)
 - E. 18 A ayat (2)
25. Perhatikan kementerian-kementerian berikut.
- 1) Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional
 - 2) Kementerian Badan Usaha Milik Negara
 - 3) Kementerian Pariwisata
 - 4) Kementerian Agama
 - 5) Kementerian Keuangan

Kementerian-kementerian yang menangani urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah ditunjukkan pada nomor

- A. 1), 2), dan 3)
- B. 1), 3), dan 5)
- C. 1), 4), dan 5)
- D. 2), 4), dan 5)
- E. 3), 4), dan 5)

26. Perhatikan nilai-nilai Pancasila berikut.

- 1) Menjamin perkembangan kehidupan beragama
- 2) Pelarangan ateisme
- 3) Tidak adanya pemaksaan beragama

Nilai-nilai tersebut terkandung dalam Pancasila sila

- A. Pertama
- B. Kedua
- C. Ketiga
- D. Keempat
- E. Kelima

27. Pernyataan berikut yang benar terkait dengan batas wilayah Indonesia adalah

- A. Sebelah selatan Indonesia berbatasan dengan Malaysia
- B. Pulau yang menandai perbatasan Indonesia-India adalah pulau Ronde di Aceh
- C. Wilayah tinur Indonesia berbatasan langsung dengan daratan Malaysia
- D. Indonesia sebelah timur berbatasan langsung dengan wilayah darat Timor Leste
- E. Sebelah utara wilayah Indonesia berbatasan langsung dengan perairan India

28. Salah satu nilai yang terkandung di dalam Pancasila terwujud dalam penerapan di kehidupan sehari-hari. Nilai yang dimaksud adalah

- A. Nilai dasar
- B. Nilai praksis
- C. Nilai positif
- D. Nilai instrumental
- E. Nilai religious

29. Cara pewarganegaraan di mana seseorang melakukan serangkaian tindakan hukum tertentu secara aktif disebut dengan istilah

- A. Stelsel pasif
- B. Stelsel aktif
- C. Naturalisasi
- D. Repudiasi
- E. Opsi

30. Warga negara keturunan bangsa X yang menganut asas ius sanguinis lahir di negara Y yang menganut asas ius soli. Maka dari itu, status warga negara tersebut adalah

- A. Apatride
- B. Bipatride
- C. Stateless
- D. Multipatride
- E. Memilih kewarganegaraan sendiri

31. Berikut yang merupakan dasar hukum yang menjamin hak warga negara untuk memiliki status kewarganegaraan adalah

- A. UUD 1945 pasal 27 ayat (3)
- B. UUD 1945 pasal 28 D ayat (4)
- C. UUD 1945 pasal 28 E ayat (1)
- D. UUD 1945 pasal 30 ayat (1)
- E. UUD 1945 pasal 31 ayat (1)

32. Salah satu cara yang paling tepat untuk membangun kerukunan beragama adalah

- A. Mencampur ajaran agama satu dengan yang lain
- B. Membatasi komunikasi dengan orang lain yang berbeda agama
- C. Saling mengikuti rutinitas agama lain
- D. Saling memengaruhi ajaran agama
- E. Mengembangkan sikap toleransi

33. Makna yang dapat digali dari sila pertama Pancasila adalah

- A. Indonesia merupakan negara bebas
- B. Indonesia memberikan kebebasan beragama dan berkepercayaan
- C. Indonesia bebas memberikan perlakuan terhadap warganya terkait agamanya
- D. Indonesia membatasi jumlah tempat ibadah untuk menghindari perselisihan
- E. Pemerintah Indonesia memberi kebebasan untuk beragama atau tidak beragama

34. Berikut makna yang dapat kita ambil dari pasal 27 ayat (3) UUD 1945 yang paling tepat adalah

- A. Setiap anak harus didik kemiliteran agar siap terjun ke medan perang
- B. Pendidikan bela negara harus menjadi kurikulum pelajaran di sekolah
- C. Setiap warga negara diperbolehkan ikut membela negara
- D. Setiap tindakan yang bertujuan membela negara dibenarkan oleh pihak pemerintah
- E. Pemerintah memfasilitasi setiap warga negara dalam usaha membela negara

35. Perhatikan hal-hal berikut.

- 1) Keikutsertaan warga negara dalam pertahanan dan keamanan negara merupakan hak dan kewajiban.
- 2) Pertahanan dan keamanan negara menggunakan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta.
- 3) Kekuatan utama dalam sistem pertahanan adalah TNI, sedangkan dalam sistem keamanan adalah Polri.
- 4) Kedudukan rakyat dalam pertahanan dan keamanan sebagai kekuatan pendukung.

Hal-hal tersebut termuat dalam UUD 1945 pasal

- A. 28
- B. 29
- C. 30
- D. 31
- E. 32

36. Perhatikan partisipasi-partisipasi warga negara berikut.

- 1) Pengajuan petisi
- 2) Pemberian suara
- 3) Konfrontasi
- 4) Kegiatan kampanye
- 5) Unjuk rasa

Partisipasi yang termasuk dalam partisipasi nonkonvensional ditunjukkan pada nomor

- A. 1), 3), dan 5)
- B. 1), 2), dan 3)
- C. 2), 3), dan 5)
- D. 3), 4), dan 5)
- E. 2), 4), dan 5)

37. Berikut yang termasuk salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah

- A. Mengawasi jalannya peradilan
- B. Membuat peraturan sebagai pelengkap untuk mengisi kekosongan hukum
- C. Memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum
- D. Memberikan nasihat hukum kepada presiden
- E. Memutuskan perkara sengketa tentang kewenangan mengadili

38. Perhatikan tugas dan kewenangan presiden berikut.

- 1) Memegang kekuasaan tertinggi atas AD, AL, dan AU.
- 2) Menyatakan keadaan bahaya.
- 3) Mengajukan RUU kepada DPR.
- 4) Mengajukan PP untuk menjalankan UU.
- 5) Mengangkat dan memberhentikan menteri.

Tugas dan kewenangan presiden selaku kepala pemerintahan ditunjukkan pada nomor

- A. 1), 2), dan 3)
- B. 1), 3), dan 5)
- C. 2), 4), dan 6)
- D. 3), 5), dan 6)
- E. 4), 5), dan 6)

39. Lembaga peradilan tertinggi di Indonesia adalah

- A. Mahkamah Agung
- B. Peradilan militer
- C. Pengadilan tinggi
- D. Pengadilan tata usaha negara
- E. Pengadilan negeri

40. Landasan hukum pelaksanaan otonomi daerah adalah UUD 1945 pada pasal

- A. 15
- B. 16
- C. 17
- D. 18
- E. 19